BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

PENGUMUMAN

NOMOR 2773 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
FORMASI TAHUN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 787 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS sebagaimana rincian dan ketentuan sebagai berikut :

1. RINCIAN FORMASI

C	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI			JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			UMUM	DISABILITAS	CUM LAUDE		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
JUMLAH SELURUHNYA						**57**	
I. TENAGA KESEHATAN						**2**	
1	ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	-	-		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS KESEHATAN, UPT PUSKESMAS SAITNIHUTA DOLOKSANGGUL
2	PERAWAT GIGI	D-III PERAWAT GIGI	1	-	-		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS KESEHATAN, UPT PUSKESMAS TARABINTANG
II. TENAGA TEKNIS						**55**	
1	ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1	-	-	2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KEPALA BIDANG PERUMAHAN, KEPALA SEKSI PELAYANAN AIR BERSIH DAN PEMELIHARAAN UTILITAS PERUMAHAN
			1	-	-		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KEPALA BIDANG PERUMAHAN, KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
2	ANALIS GIZI	S-1 GIZI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

3	ANALIS HUKUM	S-1 HUKUM	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, ASISTEN PEMERINTAHAN, KEPALA BAGIAN HUKUM, KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN DAN DOKUMENTASI HUKUM
4	ANALIS INVESTASI DAN PERMODALAN USAHA	S-1 EKONOMI/S-1 MANAJEMEN	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU, KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL, KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
5	ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
6	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	S-1 SOSIAL DAN POLITIK/ S-1 SOSIOLOGI/ S-1 PSIKOLOGI	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, ASISTEN ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KEPALA SUB BAGIAN BINA SOSIAL
7	ANALIS KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, KEPALA BIDANG PENDAPATAN, KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
8	ANALIS ORGANISASI MASYARAKAT	S-1 SOSIAL DAN POLITIK/ S-1 SOSIOLOGI/ S-1 PEMERINTAHAN	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI DAN KEMASYARAKATAN
9	ANALIS PEMANFAATAN RUANG	S-1 PLANOLOGI	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG, KEPALA SEKSI PENATAAN RUANG
10	ANALIS PENYAKIT MENULAR	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA BIDANG PENCEGAHAN PENYAKIT, KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
11	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, ASISTEN PEMERINTAHAN, KEPALA BAGIAN HUKUM, KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KAJIAN HUKUM
12	ANALIS POLITIK DALAM NEGERI	S-1 HUKUM DAN S-1 POLITIK	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEPALA SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
13	PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KEPALA BIDANG BINA MARGA, KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN
14	PENATA LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	2	-	-	2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, KEPALA BIDANG PENDAPATAN, KEPALA SUB BIDANG PEMUNGUTAN DAN PENGENDALIAN

15	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	-	1	-	10	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN, KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
			-	1	-		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
			1	-	-		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
			1	-	-		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, CAMAT BAKTIRAJA, SEKRETARIS CAMAT BAKTIRAJA, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
			1	-	-		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, CAMAT POLLUNG, SEKRETARIS CAMAT POLLUNG, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
			1	-	-		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, CAMAT SIJAMAPOLANG, SEKRETARIS CAMAT SIJAMAPOLANG, KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
			1	-	-		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, CAMAT ONAN GANJANG, SEKRETARIS KECAMATAN ONAN GANJANG, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
			1	-	-		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, CAMAT PAKKAT, SEKRETARIS KECAMATAN PAKKAT, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
			1	-	-		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KECAMATAN PARLILITAN, SEKRETARIS CAMAT PARLILITAN, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
			1	-	-		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, CAMAT TARABINTANG, SEKRETARIS KECAMATANCAMAT PARLILITAN, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
16	PENGAWAS IRIGASI	S-1 TEKNIK SIPIL	2	-	-	2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR, KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN, IRIGASI, SUNGAI DAN RAWA
17	PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL	2	-	-	4	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KEPALA BIDANG BINA MARGA, KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN
			2	-	-		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KEPALA BIDANG BINA MARGA, KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN
18	PENGAWAS MONITORING DAN EVALUASI IMUNISASI PUSKESMAS	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	-	-	2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT, KEPALA SEKSI SURVEILENS, DAN IMUNISASI
19	PENGAWAS PENGOPERASIAN ALAT BERAT	S-1 TEKNIK MESIN	2	-	-	2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KEPALA BIDANG BINA MARGA, KEPALA SEKSI PERALATAN, PENGUJIAN DAN LABORATORIUM

20	PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 TEKNIK SIPIL	2	-	-	2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KEPALA BIDANG PERUMAHAN, KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN
21	PENGELOLA ANGGARAN	D-III AKUNTANSI	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, KEPALA BIDANG ANGGARAN, KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN PEMERINTAHAN
22	PENGELOLA DATA PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH	D-III MANAJEMEN / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, KEPALA BIDANG ASET, KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
23	PENGELOLA KERJASAMA PENANAMAN MODAL	D-III MANAJEMEN / D-III EKONOMI	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU, KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL, KEPALA SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA
24	PENGELOLA KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, KEPALA BIDANG ANGGARAN, KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
25	PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB	D-III AKUNTANSI	2	-	-	2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, KEPALA BIDANG PENDAPATAN, KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
26	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	D-III MANAJEMEN / D-III EKONOMI	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
27	PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	D-III KESEHATAN MASYARAKAT	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT, KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
28	PENGELOLA PENGAMATAN PENYAKIT DAN IMUNISASI	D-III KESEHATAN MASYARAKAT	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT, KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
29	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	D-III KESEHATAN MASYARAKAT	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT, KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA
30	PENGELOLA PROGRAM GIZI	D-III KESEHATAN MASYARAKAT	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
31	PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN KELUARGA	D-III KESEHATAN MASYARAKAT	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
32	PENYULUH KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT, KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA

33	PENYULUH WISATA	S-1 PARIWISATA	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPALA BIDANG PROMOSI DAN KELEMBAGAAN, KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN
34	PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	S-1 HUKUM / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	-	-	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPALA BIDANGPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT, KEPALA SEKSI BINA KEHIDUPAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
35	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	1	-	-	2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN, KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
			1	-	-		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN, KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN KEUANGAN

2. KRITERIA PELAMAR

A. **Formasi Umum** merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini;

B. **Formasi Khusus** terdiri dari :

Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2 dan memenuhi ketentuan:

1) Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
2) Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
3) Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda;
4) Melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2.

C. Pelamar yang sudah pernah mendaftar pada Formasi CPNS Tahun 2018 dan dinyatakan memenuhi Passing Grade (P1/TL) diberikan kesempatan untuk memilih mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN;

D. Pelamar P1/TL tahun 2018 dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 untuk kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018;

E. Bagi pelamar P1/TL tahun 2018 yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur;

F. Bagi pelamar P1/TL tahun 2018 yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;

G. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar P1/TL memenuhi nilai ambang batas/passing grade SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai tertinggi antara nilai SKD Tahun 2018 dengan Tahun 2019.

H. Pelamar dari P1/TL Tahun 2018 wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan **yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018**.

3. PERSYARATAN

a. Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk;

b. **Pelamar formasi umum** paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat tanggal mendaftar;

c. **Pelamar formasi khusus Penyandang Disabilitas** berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 tahun saat mendaftar pada **SSCASN BKN**

d. **Pelamar dari penyandang disabilitas** wajib melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan apabila tidak melampirkannya (dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat)

e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/calon anggota TNI/POLRI atau

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/anggota TNI/Pegawai BUMN/BUMD;

f. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/calon anggota TNI/POLRI serta anggota TNI/ POLRI/siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;
g. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
h. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
i. Sehat Jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, khusus penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya yang bersesuaian/relevan dengan jabatan formasi yang dilamar;
j. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
k. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
l. Calon pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/ daerah dalam satu periode/ event pelaksanaan seleksi;
m. Lulus dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN-PT dengan nilai **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);

4. KELENGKAPAN BERKAS

4.1. membuat surat lamaran dengan tulisan tangan, tinta hitam, dan ditandatangani asli bermaterai Rp.6.000,- ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan di Doloksanggul (lampiran I);
4.2. pas foto berwarna (latar belakang merah) ukuran 4x6 cm;
4.3. KTP (nama dan tempat tanggal lahir harus sesuai dengan yang tertera pada ijazah);
4.4. ijazah;
4.5. transkrip nilai;
4.6. dokumen pendukung :
   a. surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- sesuai Lampiran II;
   b. STR yang masih berlaku bagi pelamar tenaga kesehatan;
   c. Formasi Khusus Penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya yang bersesuaian/ relevan dengan jabatan formasi yang dilamar;

5. TATA CARA PENDAFTARAN

5.1 setiap pelamar mendaftar secara online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dengan mengupload hasil scan dokumen asli masing-masing kelengkapan berkas sebagaimana tersebut pada point (3), dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. surat lamaran dengan format *pdf.*
   b. pasfoto warna (latar belakang merah) dengan format *Jpeg* ukuran minimal 120kb dan maksimal 200kb.
   c. KTP format *pdf.*
   d. ijazah format *pdf.*
   e. transkrip nilai format *pdf.*
   f. dokumen pendukung format *pdf.*

5.2 jadwal pendaftaran, lokasi ujian CAT, jadwal pelaksanaan ujian dapat diakses melalui portal https://sscasn.bkn.go.id ;
5.3 peserta hanya dapat memilih 1 (satu) formasi jabatan saja;
5.4 kartu peserta ujian dicetak oleh masing-masing peserta;
5.5 Setiap Pelamar wajib menunjukkan dokumen asli kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Verifikator Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk diverifikasi sesuai jadwal yang ditetapkan;

6. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No	Kegiatan	Tanggal	Ket.
1.	Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Formasi Tahun 2019	11 November 2019	Portal https://sscasn.bkn.go.id dan https://humbanghasundutankab.go.id WEBSITE HUMBANG HASUNDUTAN
2.	Pendaftaran Online	11 s.d. 25 November 2019	Portal BKN https://sscasn.bkn.go.id
3.	Pelaksanaan Verifikasi dokumen asli	18 s.d. 29 Nopember 2019	Kantor BKD Kabupaten Humbang Hasundutan (hari kerja)
4.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	9 Desember 2019	Portal https://sscasn.bkn.go.id dan https://humbanghasundutankab.go.id WEBSITE HUMBANG HASUNDUTAN
5.	Masa Sanggah	11 s.d. 13 Desember 2019	
6.	Jawaban Masa Sanggah	14 s.d. 20 Desember 2019	Portal https://sscasn.bkn.go.id https://humbanghasundutankab.go.id WEBSITE HUMBANG HASUNDUTAN
7.	Pengumuman Jadwal SKD	Dijadwalkan kemudian	Portal https://sscasn.bkn.go.id https://humbanghasundutankab.go.id WEBSITE HUMBANG HASUNDUTAN
8.	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT	dijadwalkan kemudian	dijadwalkan kemudian
9.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT	dijadwalkan kemudian	dijadwalkan kemudian
10.	Pengumuman kelulusan akhir secara *online*	dijadwalkan kemudian	dijadwalkan kemudian
11.	Pemberkasan bagi peserta yang lulus	dijadwalkan kemudian	dijadwalkan kemudian

jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui website https://sscasn.bkn.go.id dan https://humbanghasundutankab.go.id.

7. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jadwal diumumkan secara resmi melalui https://sscasn.bkn.go.id, dan https://humbanghasundutankab.go.id; Informasi/perubahan terkait penerimaan CPNS Kab. Humbang Hasundutan akan dimumkan secara resmi melalui https://sscasn.bkn.go.id dan https://humbanghasundutankab.go.id, diharapkan agar pelamar selalu mengakses laman tersebut secara rutin untuk memperoleh informasi resmi;
2. Tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT diinformasikan kembali melalui website https://sscasn.bkn.go.id dan https://humbanghasundutankab.go.id;
3. Pelamar yang tidak hadir/tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan panitia, dinyatakan gugur;
4. Pelamar dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada oknum yang menjanjikan dapat membantu kelulusan, hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum, kelulusan pelamar adalah murni prestasi pelamar sendiri; dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun dari pelamar;
5. Pelamar yang memberikan data/keterangan yang tidak benar akan digugurkan dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan melaporkan kepihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Pelayanan informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kab. Humbang Hasundutan dapat disampaikan ke https://helpdesk.bkn.go.id.

Demikian Pengumuman ini diperbuat untuk dapat diketahui, terimakasih.

Dikeluarkan di Doloksanggul
pada tanggal 11 Nopember 2019

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

DOSMAR BANJARNAHOR, SE

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 2773 TAHUN 2019
TENTANG PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN FORMASI TAHUN 2019

CONTOH SURAT LAMARAN

.....

Kepada :
Yth. Bupati Humbang Hasundutan

Di
DOLOKSANGGUL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
NIK	:
Pendidikan/Jurusan	:
Jabatan yang dilamar	:
Kategori formasi	:
Agama	:
Alamat sesuai KTP	:
No. Telp. Rumah/HP	:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan berkas lamaran dengan lampiran sebagai berikut :

1. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
2. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm latar belakang merah sebanyak 6 (enam) lembar.
3. Surat Pernyataan bermaterai Rp.6.000,- yang sudah diisi.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

materai Rp. 6.000,- tanda tangan

(nama lengkap)

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 2773 TAHUN 2019
TENTANG PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN FORMASI TAHUN 2019

CONTOH SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
NIK	:

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/calon anggota TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/anggota TNI/Pegawai BUMN/BUMD;
2. tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/calon anggota TNI/POLRI serta anggota TNI/POLRI/siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;
3. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
4. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat saya,

materai Rp. 6.000,- tanda tangan

(nama lengkap)